

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori Kepemimpinan

##### 1. Arti Kepemimpinan

Kehidupan sehari-hari ini, kata Pionir atau pemimpin dan kepemimpinan sudah tak asing lagi bagi insan ini, pemimpin berasal dari kata lead, maka seorang pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk memengaruhi orang lain dengan berbagai cara, pemimpin dalam bahasa Inggris-disebut-*leadership*-yang berarti-kekuatan untuk menjadi pemimpin untuk memimpin: kualitas seorang pemimpin.<sup>1</sup> Namun dari segi terminologi, para ahli memiliki banyak perspektif yang berbeda tentang kepemimpinan, tergantung pada apa yang para ahli pikirkan tentang sifat kepemimpinan.

Kepemimpinan adalah proses menghargai orang lain untuk memahami dan menyetujui apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya secara efektif, dan proses memfasilitasi upaya individu atau kelompok (kolektif) untuk mencapai pokok yang terpenting.<sup>2</sup> Pemimpin merupakan pengetahuan komprehensif yang mengkaji pelaksanaan tugas oleh oknum yang sesuai rencana. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan, mengarahkan, mempengaruhi atau mengendalikan pikiran, perasaan, tindakan dan perilaku orang lain.

Menurut Siagian, kepemimpinan adalah kemampuan dan keterampilan sebagai seorang pemimpin yang bekerja untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga, melalui perilaku positif, ia memberikan kontribusi lebih nyata bagi proses tercapainya yang sudah di tuju kelompok.<sup>3</sup> Pionir lah

---

<sup>1</sup> Harnby, Nanang, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), h. 88

<sup>2</sup> Gary, A. Yulk. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Diterjemahkan Oleh Jusuf Udaya, (Jakarta: Prenhallindo, 1997), h. 7

<sup>3</sup> Sondang P Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 2015), h. 9

yang memiliki kemampuan untuk menjalankan dan memotivasi serta mempengaruhi oknum yang rela melaksanakan sepaik terjang untuk terjapainya tujuan, merekalah yang mengambil ketentuan tentang apa yang akan di laksanakan melalui berbagai tindakan yang berani. Seperti yang di uraikan di atas, kembalilagi ke diri manusia nya yang dimana pemimpin bagi kaum serta dirinya.

Pemimpin merupakan tentang kekuasaan dan kuasa, dalam hal ini pemimpin ialah dari suatu kumpulan ikatan antara kelompok oknum yang di pimpin dan pemimpin. Ikatan yang bermaksud untuk mencerminkan tindakanduk otoritatif, hal ini memberikan pemimpin yang harus memberikan pengaruh bukan di hasudnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Kartini dan Kartono, pemimpin merupakan permasalahan ikatan antara pionir dan oknum yang di pimpin.<sup>5</sup> Pemimpin adalah dampak hubungan mekanis antara pion dan yang dipimpin, Pradjudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa apa yang dikutip Ngalim-Purwanto, konsep kepemimpinan dapat dipelajari berbagai aspek-aspek berikut :

- a. Kepemimpinan bisa diartikan kepripadian (*personality*) orang itu yang membuat sekelompok orang ingin menirunya atau mengikutinya, suatu kekuasaan atau otoritas yang menciptakan oknum-oknum mau melakukan yang mereka inginkan.
- b. Kepemimpinan dapat dipandang sebagai alasan tidakan serta proses dan kemauan untuk memberikan perubahan dalam sikap, cara pandang, hal ini membuat kelompok yang memiliki kaitan antara organisasi baik formal maupun informal.
- c. Kepemimpinan merupakan suatu seni, kemampuan serta taktik yang memberikan suatu individu atau bawahan dalam suatu kelompok untuk mengikuti dan menaati apa saja kehendak yang di inginkan, sehingga

---

<sup>4</sup>Aisya Amini Tanjung, *Skripsi : Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Lampung : UIN Raden Intan,2019), h.18

<sup>5</sup> Kartini, Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 6

memberikan mereka dorongan untuk taat dan mengikuti dengan suka rela.

- d. Kepemimpinan dapat dilihat bagaimana seni memberdayakan suatu kelompoknya dengan ikatan yang baik, serta kemampuan dalam memberikan motivasi yang tepat untuk saling terikat satu sama lain tanpa ada rasa perbedaan dan takut serta berusaha dalam menggapai tujuan.
- e. Kepemimpinan dapat dipandang bagaimana sumberdayanya dan perasarana, dan bagaimana kerja sama serta upayanya untuk mengarahkan serta tercapainya tujuan tertentu.<sup>6</sup>

## 2. Gaya-Pemimpinan

Kepemimpinan merupakan suatu hal bagaimana cara orang untuk mengarahkan dan memimpin dalam mempengaruhi bawahan agar selalu menjalankan apa yang di kehendaki pemimpi, dalam kepemimpinan ada beberapa ilmu yang mengkaji yaitu sebagai berikut:

### a. Gaya-Pemimpin-Otokratis/Diktatorial-(*autocratic leadership*)

Pemimpin otoriter, merupakan pemimpin yang memandang organisasi sebagai milik mereka sendiri, dengan tujuan individu lebih diutamakan ketimbang target dalam organisasi, dan bawahannya dilihat sebagai bahan untuk menjalankan organisasi. Keuntungan dari sistem otoriter ialah dalam mengambil keputusan hanyalah pemimpin yang dapat mengambil keputusan dalam berjalanya organisasi. memungkinkan eksploitasi bawahan yang kurang mampu, dan memberikan rasa aman dalam ketertiban kepada bawahannya. Kekurangan dalam sistem kepemimpinan ini ialah ketika bawahannya yang tidak menyukai pemimpinnya akan menimbulkan masalah dalam organisasi itu sendiri.

---

<sup>6</sup>Aisya Amini Tanjung, *Skripsi : Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Lampung : UIN Raden Intan,2019), h.19

**b. Pemimpin-Militeristis-(*militerisme leadership*)**

Kepemimpinan dengan jenis ini bisa di lihat di kalangan organisasi militer atau organisasi yang menggunakan sistem komando, dalam kepemimpinan militer memiliki ciri khas dimana kepemimpinan ini selalu memberikan perintah terhadap bawahannya. Dimana kepemimpinan di militer dan komando selalu menjunjung tinggi pangkat yang mereka usung, dan selalu melihat bawahan mereka sebagai yang terendah, mereka menyukai formalitas dan upacara resmi yang berlebihan dalam kegiatan apapun, ciri terakhir adalah solidaritas dengan kelompok. / masyarakat. Pemimpin dengan tipe ini, selalu ingin puja dan di hormati oleh bawahannya yang dapat menimbulkan kurangnya komunikasi terhadap atasan dan bawahan.

**c. Pemimpin-Paternalistik-(*paternalistic leadership*)**

-Kepemimpinan paternalistik ialah pemimpin yang mendahulukan kepentingan suatu kelompok, sehingga dalam kelompok itu sendiri di perlakukan yang samadan adil. Pemimpin ini memberikan ikatan baik dengan bawahan yang berifat informal, dengan ini tidak akan memberikan batasan antara bawahan dan pemimpin. Ikatan ini didasari pada pandangan antara bawahan dan pemimpin, dimana bawahannya yang belum berpikir dewasa dan perlu bimbingan akan terus menerus di berikan arahan dari pemimpin.<sup>7</sup>

**d. Pemimpin-Partisipatif-(*participative leadership*)**

Kepemimpinan partisipatif ialah gaya pemimpin yang selalu berusaha melibatkan, memberdayakan, dan mengikutsertakan semua bawahan dalam kelompok, dapat memegang peran serta tanggung jawab yang di bebankan pada seluruh bawahan. Seorang pemimpin atau pion akan selalu mempunyai ikatan yang baik pada bawahannya, sehingga antara bawahan dan pemimpin akan memiliki kerja sama dengan baik.

---

<sup>7</sup> Aisya-Amini Tanjung, *Skripsi : Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Lampung : UIN Raden Intan, 2019), h.20-21

**e. Pemimpin-(*laissez faire*)**

Kepemimpin *laissez-faire* berasumsi bahwa aktivitas organisai akan terungkap melewati peran dan memelihara bagian organisasi. Seorang pionir yang *laissez faire* tidak dapat dijadikan atasan yang ideal serta efektif buat kelompok, karena pemimpin yang ideal akan menimbulkan suatu sikap pesimis dan pasif dalam kepemimpinannya, artinya kepemimpinan yang tidak memiliki tindakan sertakeputusan dalam menjalankan suatu organisasi sehingga timbul memperikan dampak, keyakinan, dan minat. kemampuan untuk bekerja serta menjalankan organisasi tanpa ada aktivitas dan pengelolaan terhadap organisasinya.

**f. Pemimpin-Bebas-Kendal-(*free-in-leadership*)**

Pada kepemimpinan ini sering menggunakan peranya untuk mendahulukan kebutuhanya, pada pemimpinan yang seperti inilah yang membuat ketidak efektifitasnya terhadap menjalankan serta mengelola organisasi.

**g. Pemimpin-Karismatis-(*charismatic-leadership*)**

Pemimpin karismatik ialah kepemimpinan yang memiliki karismatik dalam kepemimpinannya, Karisma sendiri merupakan kemampuan yang dimiliki orang atau pemimpin untuk menarik serta dapat mempengaruhi orang yang ada di sekitarnya. Pemimpin karismatik cenderung mengantungkan harapan yang tinggi tentang kinerja bawahan dan menunjukkan kepercayaan pada bawahan. Seorang pemimpin karismatik dapat menjadi pemimpin yang ideal dan efektif jika pemimpin tersebut memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis dan partisipatif.<sup>8</sup>

**h. Pemimpin-Demokratis-(*democratis-leadership*)**

Pemimpin yang demokratis hendak fokus pada prinsipdaya guna serta efektifitas dalam pemakaian sumberenergi dalam organisainya, serta hendak

---

<sup>8</sup> Aisya Amini Tanjung, *Skripsi : Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Lampung : UIN-Raden Intan,2019), h.22-23

menggunakan pendekatan yang lebih menjunjung tinggi rasa kemanusiaan kepada bawahan. Seorang pemimpin yang demoratis hendaknya menyadari kalau kedudukannya anggota nya selalu memegang peran yang bearti untuk memastika tercapainya tujuan dengan baik dan lancar, serta sesuai tujuan organisasi itu sendiri. Sehingga pemimpin tidak terus berupaya untuk mengarahkan serta meningkatkan inovasi dan kreativitas para agnggotanya.<sup>9</sup>

Menurut Priansa dan Suwatno , gaya kepemimpinan dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

- a. Gaya kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan ini menitikberatkan pada transaksi interpersonal, antara manajemen dan karyawan, dua karakteristik yang mendasari kepemimpinan transaksional, yaitu:
  - 1) Pemimpin menggunakan penghargaan darurat untuk memotivasi karyawan.
  - 2) Pemimpin mengambil tindakan korektif hanya ketika bawahan gagal memenuhi tujuan kinerja..
- b. Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini menekankan pada perilaku simbolis pemimpin, pesan visioner dan inspiratif, komunikasi non-verbal, daya tarik nilai-nilai ideologis, stimulasi intelektual pengikut oleh pemimpin, demonstrasi kepercayaan diri dan kinerja di luar tugas.
- c. Kepemimpinan visioner. Kepemimpinan ini adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengartikulasikan visi yang realistis, andal, menarik untuk masa depan organisasi atau unit organisasi yang terus tumbuh dan terikat.
- d. Kepemimpinan tim. Menjadi pemimpin yang efektif membutuhkan keterampilan belajar seperti kesabaran untuk berbagi informasi, mempercayai orang lain, melepaskan otoritas, dan memahami kapan harus campur tangan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Toman Sony Tambunan, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h. 47-55

<sup>10</sup> Suwatno & Priansa, D, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung : Alfabeta,2011), h. 32

### 3. Peran Kepemimpinan

Menurut Abdurachman dikutip oleh Widjaja menyatakan bahwa peranan pemimpin pada hakikatnya adalah: Melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam hubungan dengan wewenang ini memberikan beberapa istilah yang mempunyai inti sama dari wewenang tersebut antara lain: 1. Actuating 2. Loading 3. Directing 4. Commanding 5. Motivating<sup>11</sup>

#### a. Pemimpinan dalam Mempengaruhi Bawahannya

Menurut Siagan, kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terutama bawahannya. Mempengaruhi, atau biasa disebut persuasi, merupakan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh setiap pemimpin.<sup>12</sup> Oleh karena itu, semua bawahannya diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa memiliki sarana untuk mempengaruhi dan mendorong bawahannya untuk melakukan tindakan yang sejalan dengan tujuan organisasi.

#### b. Pemimpin sebagai Motivator

Pemimpin juga memiliki sisi lain yang harus dilengkapi, selain menjadi pengawas, pemerintah, dan seorang yang memiliki jabatan tertinggi. Menurut Priansa dan Suwatno, seorang pemimpin harus selalu mampu memberikan motivasi dan teladan kepada bawahannya agar semangat untuk mencapai tujuan bersama tetap terjaga dan berkesinambungan.<sup>13</sup> Adapun peran kepemimpinan kepala desa dalam memotivasi bawahannya merupakan kunci penting kepemimpinannya

Motivasi kerja dalam setiap organisasi sangat penting, terutama motivasi dari seorang pemimpin sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam

---

<sup>11</sup> Abdurrahman dikutip oleh Widjaja A.W, *Pola Kepemimpinan dan Kepemimpinan Pancasila*, (Bandung Armico, 1985), h.11

<sup>12</sup> Sondang P Siagan, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta : Rinneka Cipta,2015), h.9

<sup>13</sup> Suwatno & Priansa, D, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung : Alfabeta,2011), h. 32

organisasi karena seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang besar dalam menunjang kinerja pegawainya pada suatu organisasi. Pemimpin menjadikan motivasi sebagai cara untuk menciptakan semangat, motivasi diberikan tidak hanya pada saat staf melakukan kesalahan atau kekurangan, tetapi juga dalam segala situasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dimulai dari semangat para pegawai.

**c. Pemimpin sebagai pengawas**

Pengawasan adalah sebuah fungsi management yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemimpin dalam suatu organisasi yang di pimpinnya dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin bertujuan untuk mengukur sejauh mana mekanisme dan prosedur kerja yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan hasilnya sangat memuaskan. Teori kepemimpinan Situasional yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard dengan pendekatan pendelegasian (delegating), dalam pendekatan ini dikemukakan bahwa pemimpin hanya memberikan sedikit pengarahan dan pengawasan, karena kemampuan dan keahlian bawahan sudah sangat tinggi dalam menyelesaikan tugasnya dengan efektif dan efisien.<sup>14</sup>

**d. Pemimpin sebagai komunikator**

Teori Leader Member Exchange (LMX) Dyadic, yang katanya berfokus pada hubungan yang lebih dalam yang berkembang dari waktu ke waktu antara pemimpin dan pengikut. Teori menekankan proses frekuensi, komunikasi, karakteristik bawahan, kepuasan kerja, suasana, dan komitmen. Selain itu, peran pemimpin dalam berkomunikasi dengan bawahan juga sejalan dengan teori kemitraan yang dikemukakan oleh Dyadic, yang menekankan bahwa pemimpin harus bekerja sama dengan setiap bawahan

---

<sup>14</sup> Hersey Paul and Kenneth Blanchard, Situational Leadership. (Jakarta : Prenado,2004)

satu per satu untuk menjalin hubungan layaknya rekan kerja. Ini menguntungkan kedua belah pihak.<sup>15</sup>

Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas tugasnya tetapi juga harus bergaul dengan bawahannya. Komunikasi merupakan sarana yang penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Komunikasi yang dilakukan oleh pemimpin tidak hanya sebatas persoalan pekerjaan saja tetapi jika ada waktu senggang dan tidak ada pekerjaan pimpinan tidak segan juga berkumpul dengan para bawahan untuk sekedar mengobrol.

#### 4. Indikator-kepemimpinan

Seorang pemimpin yang efektif didorong oleh tujuan jangka panjang dan memiliki aspirasi yang tinggi terhadap orang-orang di sekitarnya. Kepemimpinan memiliki banyak pengaruh terhadap keberhasilan seseorang dalam kepemimpinan dan mempengaruhi perilaku para pengikutnya (karyawan). Demikian juga kepemimpinan perusahaan saat ini akan berperan penting baik dalam lingkungan maupun kinerja karyawannya.

Menurut Mangkunegara ia menyatakan dalam teori sifat bahwa seseorang sudah memiliki sifat kepemimpinan tetapi itu tergantung pada bagaimana orang tersebut dapat menanganinya. Sifat-sifat tersebut dapat tumbuh dengan tingkat prestasi melalui pendidikan dan pelatihan. Beberapa sifat yang dimiliki oleh seorang pemimpin antara lain taqwa, waras, cakap, jujur, sabar, tegas, setia, cerdas, berani, disiplin, berpikiran terbuka, komunikatif, berkemauan keras, bertanggung jawab, dan sifat-sifat positif lainnya.<sup>16</sup>

Bakat kepemimpinan adalah seorang pemimpin yang harus memiliki sifat rendah hati dan berintegritas. Dalam kepemimpinan, diri sendirilah yang akan melihat

---

<sup>15</sup> Armhela Fazrien dkk, *Peran Pemimpin dalam Pencapaian Kinerja Pegawai (Studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.2 No.4, h.605,

<sup>16</sup> A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2013)

bagaimana seseorang dianggap mampu memimpin orang lain. Introspeksi adalah cara yang tepat untuk mengetahui apakah seseorang memiliki bakat kepemimpinan dan dapat memimpin orang lain. Dengan introspeksi, dia tidak akan mudah menyalahkan orang lain, dan itulah bakat yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan bakat seorang pemimpin untuk rendah hati, semoga para pengikutnya menyadari bahwa mereka benar-benar mengabdikan sebagai perintah pemimpin tanpa harus menggunakan paksaan untuk menggerakkan mereka.

Menurut Karim, pemimpin yang sangat berkomitmen adalah pemimpin yang banyak berkorban untuk mewujudkan visi dan misi. Pengorbanan itu dilakukan karena pemimpin mencintai visi dan misi organisasi. Selain dua perilaku di atas, ada juga perilaku lain seperti visi yang jelas, ketekunan, ketekunan, konsistensi dalam perkataannya, menanamkan rasa hormat kepada karyawannya, menimbulkan kebanggaan dan meningkatkan kepercayaan pada pengikutnya. Selanjutnya, pola pikir seorang pemimpin harus lebih terbuka atau transparan, terutama dalam hal posisi sumber daya manusia yang ada<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan menurut Mangkunegara, Tjihardjaji dan Karim mengenai karakteristik pemimpin, dalam penelitian ini penerapan indikator kepemimpinan yang disesuaikan dengan kepemimpinan yang efektif adalah:

- a. Kerendahan hati
- b. Kejujuran, Keadilan dan dapat dipercaya
- c. Berkomitmen
- d. Kesabaran
- e. Transparan<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Muhammad Karim, *Pemimpin Transformasional di Lembaga Pendidikan Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.24

<sup>18</sup> A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya,2013)

## 5. Prinsip-Kepemimpinan

Seseorang pemimpin wajib memiliki sikap yang bisa diterima oleh anggotanya dan organisasi, pemimpin wajib serta sanggup untuk mempengaruhi sikap terhadap anggota agar apa yang sudah ditentukan bisa dijalankan sesuai perintah dan mampu menjalankannya<sup>19</sup>. Kepemimpinan didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

- a. Kalau tiap orang mempunyai kemampuan buat tumbuh jadi seorang pemimpin harus wajib untuk menerapkan kemampuan yang dimiliki untuk mengarahkan, hal ini bertujuan agar organisasi atau kelompok akan berjalan dengan maksimal serta mengutamakan kebaikan diri dan organisasi.
- b. Mempunyai prinsip solidaritas serta subsidiaritas, solidaritas berarti solidaritas/berbagi nasib yang sama dengan mereka yang dibimbing. Subsidiaritas merupakan asas yang dewasa ini kerap diucapkan “self-help”, dalam makna keputusan mengenai kehidupan serta nasib organisasi ataupun warga tertentu wajib terbuat sendiri serta bukan oleh pemimpin ataupun organisasi lain.<sup>20</sup>
- c. Cintailah orang lain semacam yang diajarkan seluruh agama. Pemimpin butuh mempunyai perilaku hirau, ialah perilaku positif, sebab bila mereka takut, mereka hendak melaksanakan suatu buat meringankan penderitaan yang dirasakan rakyatnya.
- d. Responsibilitas atau menepati ikrar wajib jadi pedoman yang dijunjung besar oleh seseorang pemimpin serta dituntut oleh mereka yang dipandu oleh mereka yang dipandu. Tanggung jawab membuat kepemimpinan seorang berharga serta dihargai oleh mereka yang dibimbing serta penuh komitmen mereka. Bertanggung jawab atas apa yang sudah dicoba dalam perihal gimana ia memakai otoritas yang sudah dibebankan pada dirinya.

---

<sup>19</sup> Bernandine Wijaya, *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, (Yogyakarta:Pustaka Nasional, 2005), h.8-9

<sup>20</sup> Bernandine Wijaya, *Kepemimpinan Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, (Yogyakarta:Pustaka Nasional, 2005), h.11-12

- e. Kepemimpinan ialah perihal tentang keamuan serta kemampuan seorang untuk berbuat perubahan, satu sikap yang dinamis dari pada suatu perilaku yang tidak aktif. Hal tersebut diharapkan sebab di kenyataannya segalanya berubah-ubah, sebab seorang pemimpin wajib mempunyai visi dan keberanian sekaligus tetap rendah hati, dalam berbuat terus mempunyai kreativitas yang baik untuk maju dan berkembang. Pada diri sendiri sini artinya pemimpin yang mampu berubah menjadi pemimpin yang layak untuk diri sendiri dan orang lain.

Dengan prinsip dan konsep kepemimpinan tersebut pada dasarnya meletakkan manusia menjadi titik sentral, dimana mulainya keputusan yang di buat sang seseorang pionir, dalam menentukan nasib dan anggota serta organisasi. Di semua umat, kita sudah terlihat bagaimana keputusan pada kepemimpinan yang tidak mendahulukan kepentingan masyarakat kemudian membuat rakyat menderita buat memberikan kita yang sangat usang. Kesakitan yang di perkeruh sang kurangnya kasih sayang, dan kedekatan serta pelayanan berasal dari atasan yang kurang memandang.<sup>21</sup>

## 6. Pengertian Pemimpin Kepala Desa

Pada penjelasan sosiologis ilustrasi desa sebagai suatu corak kesatuan warga dan komunitas yang hayati pada ruanglingkup tertentu yang mempunyai ikatan, gaya hayati dan mereka cukup rata dan ply bergantung di sekitar pada besarnya rung lingkup. Komunitas. itu tidak terlalu besar, populasinya tidak besar. padat, adat istiadat yang masih kokoh, mobilitas sosial yang rendah dan solidaritas yang tinggi.<sup>22</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004, desa atau yang disebut dengan nama lain, adalah kesatuan hukum masyarakat yang memiliki batas-batas yurisdiksi,

---

<sup>21</sup> Sondang P Siagian, *Teori dan Praktek Kepemimpinan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h.75

<sup>22</sup> Munandar Solaeman, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009), h.132-139

mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berkedudukan di suatu Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap organisme pasti memiliki kepala, kepala ini berperan sebagai pengatur segala sesuatu di dalam tubuh yang diarahkannya. Lebih lanjut Ndraha menyatakan bahwa setiap organisme memiliki bagian yang berfungsi untuk mengendalikan seluruh tubuh organisme tersebut. Bagian itu disebut kepala. Padahal, setiap benda dianggap memiliki kepala, misalnya kepala meja, kepala pentungan dan sebagainya. Organisasi juga merupakan organisme hidup. Setiap organisasi atau unit kerja juga memiliki seorang pemimpin yang ditunjuk oleh seorang pemimpin yang lebih formal. Untuk bekerja, atasan diberikan atau memperoleh kekuasaan yang sah yang disebut wewenang melalui beberapa cara: turun temurun (tradisi), diberikan (kekuasaan disajikan, didelegasikan, dipilih, ditunjuk), dibagi (sharing), diakui kebesaran, pujian, penyembahan, kepercayaan) atau penaklukan dengan paksa.<sup>23</sup>

Jika kita mengaitkan dan menganggap bahwa desa adalah organisme, maka desa memiliki “kepala” yang mengatur segalanya. Kepala desa disebut kepala desa. Istilah Kepala pada umumnya berkaitan dengan makna konotasi suatu jabatan dalam hierarki atau struktur organisasi, yang secara otomatis memuat fungsi, wewenang, dan tanggung jawab. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan dengan pemerintahan, Ndraha menyatakan bahwa: Kepemimpinan pemerintahan adalah penerapan teori kepemimpinan dalam bidang pemerintahan, yang diwarnai dengan ciri khas bidang pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan menunjukkan daerah perbatasan antara gejala kepemimpinan dan gejala pemerintahan. Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari konsep-konsep yang berkaitan dengan kepemimpinan

---

<sup>23</sup> Taliziduhu Ndraha, *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), h.212

dalam kaitannya dengan sistem nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal. Seorang pemimpin formal atau pemimpin kepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat, sehingga ia harus memilih peran sebagai bos atau sebagai pemimpin.<sup>24</sup>

Terkait dengan kemampuan memainkan peran kepemimpinan, Taliziduhu Ndraha lebih lanjut menyatakan bahwa: Konsep kepemimpinan pemerintahan terdiri dari dua (sub) konsep yang saling berkaitan, tesis, yaitu konsep kepemimpinan dengan sistem nilai-nilai sosial dan konsep pemerintahan yang mengandung sistem nilai formal. Setiap saat, seorang pemimpin formal atau pemimpin kepemimpinan dihadapkan pada berbagai situasi dan perubahan yang cepat. Dia harus memilih peran, sebagai bos atau sebagai pemimpin. Dari sudut pandang ini, ketika seseorang memainkan peran, ia harus mempertimbangkan peran lain. Peran mana yang mendukung peran mana, peran mana yang dapat menghambat peran mana, peran mana yang bertentangan dengan peran yang mana, dan seterusnya.<sup>25</sup>

Dalam rangka mewujudkan prinsip demokrasi dan sebagai tindak lanjut dari UU no. 32 tahun 2004, maka dipilihlah Kepala Desa langsung oleh penduduk desa yang telah memenuhi persyaratan. Pemilihan tersebut diatur dalam Pasal 46 PP No.72 tahun 2005 yang berisi :

- a. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari antara calon yang memenuhi persyaratan
- b. Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER JURDIL)
- c. Pemilihan kepala desa berlangsung melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan kepala desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

---

<sup>24</sup> Taliziduhu Ndraha, *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), h. 254

<sup>25</sup> Taliziduhu Ndraha, *Teori Budaya Organisasi*, Cetakan Kedua, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), h.226

Kepemimpinan kepala desa sangat diperlukan untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan desa. Kepala desa bertugas mengurus desa, yaitu a). Urusan pemerintahan, termasuk pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa, seperti penjabaran peraturan daerah, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik daerah dan kerjasama antar desa, b). Urusan pembangunan, termasuk pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa. c). Urusan kemasyarakatan, yang meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pemajuan kehidupan sosial budaya masyarakat, seperti di bidang kesehatan, pendidikan dan moral.<sup>26</sup>

Trisantono mengatakan, untuk melaksanakan tugas tersebut kepala desa mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- b. Mengajukan perancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah disahkan oleh BPD,
- d. Menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan desa tentang anggaran desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e. Membina kehidupan masyarakat
- f. Membina perekonomian desa
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa
- h. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewailinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 2011 (Bandung : Fokus Media), h.7

<sup>27</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, 2011 (Bandung : Fokus Media), h.8

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kepala desa mempunyai kewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan keutuhan NKRI
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi,
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari KKN,
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa,
- g. Mena'ati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan,
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa,
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa,
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa,
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa
- m. Membina, mengayomi, dan melestarikan adat istiadat,
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu, kepala desa berkewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati/walikota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan menginformasikan kepada masyarakat laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa harus mampu memimpin dalam berbagai situasi dan perubahan. Karena pemimpin yang memimpin atau leader yang menjadi bos adalah garda depan, pelopor dan pemimpin yang berdiri di depan, menerobos, menaklukkan (mengantisipasi dan memberikan solusi), mengintegrasikan dan memberi warna. Fungsi-fungsi ini seperti jarum dengan benang. Dalam hal ini, benang merah nya adalah manajemen. Proses dan hasil akhir dari setiap kegiatan ditentukan, bukan oleh satu, tetapi oleh keduanya. Jarum harus tajam dan benang harus

kuat sehingga tentunya harus ada keserasian, keserasian dan keseimbangan antara keduanya. Kartono juga menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu menjalankan fungsinya yang meliputi memimpin, membimbing, membangun, membimbing, menginformasikan, membangun motivasi kerja, memimpin organisasi, membangun jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien. / mengawasi dan membawa karyawan ke tempat kerja. pelacak ke tujuan yang dituju sesuai dengan ketentuan waktu yang ditentukan.<sup>28</sup>

Kepala desa merupakan konsep kepemimpinan terapan yang diterapkan dalam pemerintahan desa. Seorang kepala desa harus mampu menjalankan dua peran, yaitu peran kepala desa yang merupakan pimpinan formal di desa, serta sebagai pemimpin sosial kemasyarakatan di desa yang dipimpinnya. Dimana kepala desa harus mampu berintegrasi sebagai pemimpin pemerintahan desa formal yang juga merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan sekaligus sebagai pemimpin sosial yang dapat menyambut dan menjadi penyalur aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.

Pada dasarnya pembangunan yang dilakukan di desa yang dipimpin oleh kepala desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Artinya kepemimpinan kepala desa juga merupakan bagian dari kepemimpinan nasional. Kepala desa sebagai penanggung jawab utama pemerintahan, pembangunan dan masyarakat harus memiliki kemampuan menggerakkan masyarakat desa untuk berpartisipasi secara bersama-sama dalam pembangunan desa. Untuk dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat desa, serta pelaksanaan kepemimpinannya, kepala desa harus memiliki kemampuan yang diterapkan dalam upaya menggerakkan, mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat yang dipimpinnya..

---

<sup>28</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah Pemimpin Abnormal itu ?*, 2001 ( Jakarta : Raja Grafindo Persada), h. 33

## B. Etika Politik Islam

### 1. Etika Politik Islam

#### a. Definisi Etika

Etika dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral (moral). Bartens menyatakan bahwa etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu ethos dalam bentuk tunggal yang dapat diartikan sebagai adat istiadat, moral, moral yang baik. Bentuk jamak dari etos adalah ta etha yang dapat diartikan sebagai adat. Dari pengertian bentuk jamak tersebut terbentuklah istilah etika yang digunakan oleh Aristoteles, seorang filosof Yunani, untuk menunjukkan filsafat moral.<sup>29</sup>

Pandangan lain tentang etika juga dikemukakan oleh James J Spillane SJ, yang menyatakan bahwa etika memanifestasikan dirinya dari perilaku manusia dalam hal keputusan moral. Etika juga mengarahkan penerapan pikiran setiap orang dengan objektivitas untuk memilih benar atau salah suatu perilaku terhadap orang lain.<sup>30</sup> Selanjutnya menurut Burhanuddin Salam, etika adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia.<sup>31</sup>

Jika dilihat dari ruang lingkup dan pengertian etika sangat erat kaitannya dengan moralitas. Kata moral sendiri berasal dari kata latin mos dan bentuk jamaknya adalah adat istiadat yang dapat diartikan sebagai adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku, budi pekerti, watak dan cara hidup. Pengertian ini sama dengan etika dalam bahasa Yunani, yang keduanya berarti adat-istiadat tentang perilaku yang baik dan buruk.<sup>32</sup> Namun pada kenyataannya, moralitas dan etika

---

<sup>29</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.1

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

<sup>31</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Sosial*, (Jakarta: Rineka Cita, 2002), h. 1

<sup>32</sup> Franz Magniz Suseno, *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Etika dan Moral*, (Yogyakarta: Kanesis, 1997), h. 19.

memiliki pengertian yang berbeda. Jika moralitas lebih diorientasikan untuk memahami baik buruknya nilai setiap individu, sedangkan etika lebih kepada ilmu yang mempelajari baik buruknya perilaku individu. Jadi dapat dikatakan bahwa etika disini berfungsi sebagai teori tentang perbuatan baik atau buruk. Namun, dalam filsafat, etika terkadang disamakan dengan filsafat moral.<sup>33</sup>

Etika juga biasa disebut ilmu normatif, karena di dalamnya terdapat norma dan nilai yang biasa digunakan dalam kehidupan. Ada juga sebagian orang yang menyebut etika sebagai moralitas atau karakter. Ilmu etika adalah ilmu yang berusaha menyeimbangkan tindakan individu dengan landasan mendalam yang diperoleh dengan menggunakan pikiran manusia. Sedangkan Burhanuddin Salam berpendapat bahwa etika adalah cabang filsafat yang berbicara tentang nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya.<sup>34</sup>

Kata lain untuk etika, yaitu akhlak, berasal dari bahasa Arab, yaitu *khalaqah* yang berarti menciptakan, jika dalam bentuk jamaknya *khuluq* yang berarti budi pekerti atau tingkah laku. Moralitas bukan hanya seperangkat aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar manusia, tetapi juga mengatur manusia dengan Tuhan dan juga alam semesta. Antara etika, akhlak dan akhlak mengandung persamaan yaitu sama-sama menentukan baik buruknya perbuatan manusia. Namun selain itu juga memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu untuk etika standarnya ada pada akal, untuk standar moral ada pada adat-istiadat umum yang ada di masyarakat, dan untuk moralitas standarnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>35</sup>

---

190 <sup>33</sup> Haidar baqir, *buku saku filsafat islam*, (bandung mizan, 2005), hal 189-

Juni <sup>34</sup> M. Thahir Maloko, *Etika Politik Dalam Islam*, al-daulah Vol. 1 / No. 2 /

2013, h. 52

<sup>35</sup> Yunahar Ilyas, *Kuliah Akhlak*, (Yogyakarta: LPPI,2001), h.1

Perbedaan etika, moral dan moral juga dapat dilihat dari objeknya, dimana etika dan moral hanya berfokus pada tindakan terhadap manusia lain, tetapi berbeda dengan moralitas yang menekankan setiap tindakan terhadap Tuhan dan manusia lainnya juga. Jadi istilah etika dan moral bersifat antroposentris (hanya kemanusiaan) karena tujuan dan sasarannya hanya untuk manusia lain. Meskipun istilah akhlak lebih bersifat teosentris, meskipun ada akhlak yang ditujukan kepada manusia dan makhluk lainnya, namun fokus utamanya adalah syukur kepada Allah SWT.

Franz Magnis Suseno mengungkapkan bahwa etika adalah ilmu atau refleksi sistematis yang berkaitan dengan pendapat moral, norma dan istilah. Jika diartikan secara luas, etika dapat diartikan sebagai norma-norma umum dan penelitian yang digunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya.<sup>36</sup> Aristoteles juga mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian etika. Baginya, etika adalah ilmu tentang tindakan yang tepat dalam bidang fitrah manusia. Objek etika itu sendiri adalah sifat yang berubah, terutama sifat manusia, jadi etika bukanlah ilmu. Tujuan etika bukanlah untuk mengklasifikasikan pengetahuan, tetapi untuk mempraktikkan, bukan untuk mengetahui apa itu kehidupan yang baik, melainkan untuk membuat orang menjalani kehidupan yang lebih baik.<sup>37</sup>

Franz Magnis Suseno juga berpendapat bahwa ada beberapa alasan mengapa etika politik yang baik diperlukan saat ini. Pertama, karena kehidupan dalam masyarakat semakin pluralistik, termasuk dalam hal moralitas. Karena begitu banyak suku, daerah, dan agama yang berbeda, ketika mereka bertemu atau berinteraksi satu sama lain, akan ada banyak pandangan

---

<sup>36</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Jawa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 6

<sup>37</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1

yang bertentangan tentang moralitas, karena masing-masing akan merasa bahwa pemahaman yang dianutnya adalah yang paling benar. Kedua, manusia saat ini hidup di era transformasi sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perubahan di segala aspek kehidupan terjadi di bawah hantaman gelombang modernisasi. Gelombang ini telah mencapai seluruh pelosok tanah air, termasuk pelosok.<sup>38</sup>

Etika bersifat relatif, dalam arti dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih lanjut, etika juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kebaikan dan keburukan yang dilakukan dalam kehidupan manusia, khususnya tindakan manusia berdasarkan kehendak dan pikiran yang jernih, dengan menggunakan pertimbangan perasaan.<sup>39</sup> Sebagai ilmu, etika terbagi menjadi berbagai jenis dan ragam, yang meliputi :

1) Etika Deskriptif

Etika deskriptif adalah etika yang memberikan gambaran tentang perilaku manusia dari segi nilai baik atau buruk dan juga apa yang dapat dilakukan sesuai dengan norma etika yang telah dianut masyarakat.

2) Etika Normative

Jika etika deskriptif menjelaskan, maka etika normatif tidak menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan. Tujuan dari etika normatif adalah untuk merumuskan prinsip-prinsip etika yang dapat dibenarkan secara rasional dan dapat digunakan dalam praktik. Contoh penerapan etika normatif adalah penolakan terhadap kebiasaan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) karena tindakan tersebut dapat merugikan orang lain.

Etika normative dikelompokkan dalam beberapa, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>38</sup> Franz Magnis Suseno, *13 Tokoh Etika Sejak Zaman Yunani Sampai Abad XIX*, (Jakarta: Kanisius, 1998), h. 39

<sup>39</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, h.23

- a) Etika Umum, membahas berbagai persoalan yang berkaitan dengan kondisi manusia untuk bertindak secara etis dalam mengadopsi berbagai jenis kebijakan berdasarkan teori dan prinsip moral yang ada..
- b) Etika Khusus, etika khusus terdiri dari :
  - 1) Etika sosial, yaitu etika yang menekankan tanggung jawab sosial dan juga hubungan antar manusia dalam setiap aktivitas yang dilakukan dalam kehidupan.,
  - 2) Etika individu, adalah etika yang menekankan kewajiban individu sebagai manusia.
  - 3) Etika terapan, adalah etika yang diterapkan pada suatu profesi.<sup>40</sup>

## 2. Definisi Etika Politik Islam

Politik dalam politik Inggris, secara leksikal, berarti bertindak menilai dengan bijak, menilai dengan baik, bijaksana, yaitu dengan bijaksana atau bijaksana. Politik dalam bahasa latin adalah *politicus*, dalam bahasa Yunani *politicos*, berasal dari kata *police* yang berarti kota “kota”. Politik dalam bahasa Indonesia memiliki tiga arti, yaitu (1) segala urusan dan tindakan (politik, taktik, dan sebagainya) yang berkaitan dengan pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, (2) penipuan atau kelicikan dan (3) menggunakan nama negara. sebuah disiplin ilmu. pengetahuan, yaitu ilmu politik.

Dalam kaitannya dengan etika dan politik, filsafat politik digunakan untuk mempersoalkan persoalan nilai-nilai etika, pertanyaan yang diajukan adalah abstraksi moral yang bersumber dari upaya manusia untuk memaknai kehidupan dengan ajaran yang lebih baik dan pasti. Menurut Magniz Suseno, etika politik pada dasarnya merupakan cabang filsafat. Sebagai perusahaan ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang. Dua cabang utama filsafat adalah filsafat teoretis dan filsafat praktis. Filsafat

---

<sup>40</sup> <http://www.pengertianku.net/2014/06/pengertian-moral-dan-etika-lengkap.html>. Di akses pada 21 Juni 2022 pukul 23:44 WIB

teoretis mempertanyakan apa yang ada dan bagaimana manusia harus berperilaku terhadap apa yang ada.

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam bidang ini adalah apa itu manusia, alam, alam, realitas, apa itu pengetahuan dan sebagainya. Sedangkan filsafat yang secara langsung mempertanyakan praktik manusia adalah etika. Beberapa prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan sosial, persamaan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam konteks negara, kepercayaan dapat berupa kekuasaan atau kepemimpinan. Kekuasaan adalah amanah, sehingga Islam secara tegas melarang pemegang kekuasaan menyalahgunakan atau menyalahgunakan kekuasaan yang telah dikirkannya. Oleh karena itu, pemegang kekuasaan atau pemimpin harus bertindak adil dalam arti kata yang sebenarnya.

Al-Qur'an merupakan pedoman bagi umat Islam, sehingga tidak berlebihan jika Al-Qur'an dijadikan sebagai konsep etika politik, dimana etika ingin menjawab "bagaimana menjalani kehidupan yang baik". Dengan demikian Alquran menerangkan tentang etika dan moral sebagaimana terdapat dalam QS. Al- Imran/ 3.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿٣﴾

Artinya : *“Dia menurunkan kepadamu (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur’an) dengan hak, membenarkan (kitab-kitab) sebelumnya, serta telah menurunkan Taurat dan Injil”*

Isi ayat di atas menjelaskan tentang etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi dari masyarakat, termasuk memiliki sifat yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberikan kenyamanan dan kedamaian kepada masyarakat. Sifat-sifat tersebut merupakan faktor subjektif yang dimiliki oleh

seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk ikut serta dalam musyawarah. Di sisi lain, jika seorang pemimpin tidak memiliki sifat-sifat tersebut di atas, orang pasti akan menjauh dan tidak memberikan dukungan.

Faisal Baasir harus mendasarkan etika politik berbangsa dan bernegara pada nilai-nilai luhur ajaran agama. Karena agama merupakan sistem nilai yang diyakini kebenarannya, ia adalah pelita dan pedoman hidup dan modal ketenangan jiwa sebelum seseorang memutuskan suatu tindakan tertentu.<sup>41</sup>

Kekuasaan sebagai amanah merupakan prinsip ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Prinsip amanah tercantum dalam Alquran surah Al-Nisa/4:58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : *sebelum (turunnya Al-Qur'an) sebagai petunjuk bagi manusia, dan menurunkan Al-Furqān (pembeda yang hak dan yang batil). Sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang sangat keras. Allah Mahaperkasa lagi mempunyai balasan (siksa).*

Arti dari amanah adalah "setoran" atau "pesan". Dalam demokrasi Islam, amanah dipahami sebagai "hadiah atau nikmat dari Allah yang merupakan bentuk pemeliharaan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan dalam Al-Qur'an yang nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah.

<sup>41</sup> Faisal Baasir, *Etika Politik: Pandangan Seorang Politisi Muslim* (Cet. I; Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 145

### 3. Etika Kepemimpinan

Kepemimpinan yang beretika adalah pribadi yang beretika yang mampu memanfaatkan segala potensi yang ada pada seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya untuk membawa organisasi yang dipimpinnya ke puncak kesuksesan. Seorang pemimpin yang beretika akan mampu membawa organisasi yang dipimpinnya ke puncak kesuksesan dengan memanfaatkan segala potensi yang ada pada seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya.

Pemimpin menggunakan etika sebagai dasar untuk mengoptimalkan semua bakat dan potensi sumber daya manusia, meningkatkan nilai dari semua sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, dan menghormati semua kualitas dan keterampilan sumber daya manusia. Bukan pemimpin yang menciptakan jurang pemisah antara mimpi dan kenyataan. Tapi dia adalah seorang pemimpin moral yang membantu mimpi semua pengikutnya menjadi kenyataan dalam kebahagiaan.

Perkembangan kepemimpinan etis di Indonesia terus mengalami dinamika. Orang juga mencari pola kepemimpinan yang dianggap baik, peduli, progresif, atau produktif. Pilihan ini dapat ditemukan di lembaga pemerintah, swasta atau masyarakat. Sangat kontras dengan pemimpin tidak etis lainnya, beberapa pemimpin dipuja dan dianggap buta huruf. Kepemimpinan etis memiliki lima prinsip, yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan bebas dari konflik kepentingan.

Ini sesuai dengan mereka yang diberdayakan untuk bertanggung jawab atas penggunaan kekuatannya. Konsep tanggung jawab dalam Islam disebut amanah. Pemimpin atau siapapun yang bertanggung jawab dalam kewenangannya memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas berupa kewajiban memberikan hak yang layak bagi masyarakat. Dijelaskan pula dalam ulasan Achmad Farid tentang etika politik Islam bahwa hal ini terkait dengan prinsip amanah yang dianut oleh agama yang didengungkan oleh ibn Taimiyah dalam karyanya yang terkenal berjudul “al Siyashah al-Syar’iyyah”. Hal ini berdasarkan pembahasan “Memenuhi Amanat” (Ada’u al-Amanah) dalam QS. Al-Nisa ayat 58. Menurutnya, ada dua aspek

penting dalam pelaksanaan amanah, pertama, aspek jabatan dan metodologi pengangkatannya (al-walayah). Kedua, yaitu aspek harta atau kekayaan (al-amwil).<sup>42</sup>

Amanah harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ia menilai amanah tersebut harus diberikan kepada orang yang tepat. Sebab, amanah bukanlah perkara biasa. Di hari kiamat amanah ini menjadi bentuk penghinaan dan penyesalan bagi mereka yang tidak mampu memenuhinya. Namun di sisi lain, bagi mereka yang melaksanakan sesuai dengan haknya dan sebagaimana mestinya, maka amanah ini menjadi jariah bagi pemiliknya.

## C. Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah

### 1. Biografi Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah, nama lengkapnya adalah Abu-‘Abbas Ahmad Taqiyuddin Ibnu as-Syaikh Majdi ad-Din Abi al-Barakat Abdu as-Salam Ibnu Abi Muhammad Abdillah Abi al-Qosim al Khaidiri.<sup>43</sup> Ia lahir pada tanggal 10 Rabiul awal 661 H/ 22 Januari 1263 M. Di Harran, daerah Palestina dekat Damaskus, dari keluarga ulama Syria yang setia dengan ajaran puritan dan amat terikat dengan mazhab Hanbali.<sup>44</sup> Kakeknya adalah Abdu as-Salam adalah seorang ulama pemuka agama tersohor di Bagdad. Tradisi ini turun temurun sampai Abdul al-Halim ayahnya Ibnu Taimiyah yang menjabat kepala sekolah terkemuka di Damaskus.<sup>45</sup>

Julukan Ibnu Taimiyah adalah Abdul Abbas, namanya adalah Ahmad dan gelarnya adalah Tiqiyuddin. Lengkapnya adalah Abul Abbas Ahmad Taqiyuddin.

---

<sup>42</sup> Achmad Farid, *PRINSIP ETIKA POLITIK PEMIMPIN DALAM ISLAM*, Dauliyah, 2 Juli

2019, Vol. 4, No 2 h. 76

<sup>43</sup> M. Hasan al-Jamal, Hayatu al-A, Immatun, terj. M. Khaled Muslih, Imam Awaluddin, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), h. 203

<sup>44</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *The Islamic of Story of Government According to Ibnu Taimiyah*, terj. Masroni, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), h. 20

<sup>45</sup> Abul Hasan Ali an-Nadawi, *Syikhul Islam Ibnu Taimiyah*, terj. Qadirunnur, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h. 47

Sedangkan sebab munculnya laqab “Ibnu Taimiyah” menurut suatu riwayat, kakek Syikhul Islam, Muhammad bin Khadir pergi menunaikan haji dan dia memiliki seorang istri yang tengah hamil (yang ditinggalkannya) melewati daerah Taima’. Disana kakeknya melihat seorang anak perempuan masih kecil keluar dari tempat persembunyiannya (karena sedang bermain). Ketika sang kakek kembali ke Harran, dia mendapatkan istrinya telah melahirkan seorang anak perempuan (yang kemudian akan menjadi ibunya Ibnu Taimiyah), maka ketika ia melihatnya (ia teringat anak perempuan di daerah Taima’ mengatakan, Ya Taimiyah, ya Taimiyah”, sehingga kemudian Syikhul Islam digelari dengan Ibnu Taimiyah (anak Taimiyah).<sup>46</sup>

Ibnu Taimiyah berasal dari Harran. Ibnu Jubair berkata, “cukup bagi kampung ini sebagai kemuliaan dan kebanggaan, bahwa kampung inilah tempat bapak kita Nabi Ibrahim As”. Cuaca di Harran sangat berpengaruh pada siikap Ibnu Taimiyah, yakni menjadikan seorang yang berperilaku bersih, bagus tingkah laku dan *istiqomah*, disamping cuaca panasnya mampu mengobarkan semangat bela agama.<sup>47</sup>

Sekitar tahun 667 H/ 1268 M. Keluarganya (Ibnu Taimiyah) bermigrasi ke Damaskus untuk menghindari kekejaman bangsa Mongol atau tentara Tartar. Beliau datang bersama orang tuanya dan keluarganya ke Damaskus ketika beliau masih kecil. Mereka eksodus dan melarikan diri dari kota Harran demi menghindari kezhaliman dan kesewenang-wenangan bangsa tartar kala itu. Mereka berjalan di malam hari, dengan membawa kitab-kitab yang mereka angkut dengan gerobak yang ditarik sapi ternak karena tidak ada hewan tunggangan, sehingga hampir saja mereka berhasil disusul oleh musuh. Karena beratnya muatan gerobak tersebut mogok, maka

---

<sup>46</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, terj. Izzudin Karimi, *Fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah tentang Khalifah Islamiyah, Memerangi Pemberontakan, Hukum Murtad, Pengadilan Negeri, Sumpah dan Nadzar, Makanan Halal dan Haram*, (Jakarta: Pustaka Sahifah, 2008), h. 18

<sup>47</sup> Said Abdul Aahim, *Ibnu Taimiyah Pembaharu Salafi dan Dakwah Reformasi*, terj. Faisal Saleh, Khoerul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), h. 17

mereka bermunajat kepada Allah untuk memohon pertolongan kepada-Nya, hingga mereka pun terhindar dari musuh dan selamat, dan disanalah untuk pertama kalinya Syaikhul Islam kecil menghadiri majlis ilmu guru beliau yang pertama, Asy-Syekh Zainuddin Ahmad bin ad-Da'im al-Maqdisi.<sup>48</sup>

Ketika pindah ke Damaskus tersebut, Ibnu Taimiyah berusia 6 tahun. Orang tuanya mempeunyai pandangan kedepan dan mengerti pentingnya pendidikan.oleh sebab itu ia diasuh dan di didik dengan baik. Dengan pendidikan yang begitu terarah, sehingga dalam usia yang relatif muda sudah hafal Al-Qur'an. Disamping potensi kecerdasannya, lingkungan keluarga, ia sangat mencintai ilmu dan giat mencarinya pada siapa, dimana dan kapan saja. Tiada hari baginya tanpa membaca, mendengar dan berdiskusi. Di Damaskus Ibnu Taimiyah berhasil menyelesaikan studinya di bawah bimbingan sang ayah. Studi yang ditekuninya didasarkan paradigma dan kaidah-kaidah mazhab Imam Hambali. Ia juga banyak belajar kepada syekh-syekh yan lain, oleh sebab itu tidak mengherankan jika kemudian ia sangat menguasai berbagai disiplin ilmu seperti, Al-Qur'an, Hadis, Tafsir, Fiqh, Ushul Fiqh, bahasa, berhitung, logika dan filsafat.

Disebutkan bahwa pendidikan Ibnu Taimiyah dimulai dengan mengaji kepada ayah dan pamannya. Ia juga belajar kepada beberapa ulama terkemuka di Damaskus dan sekitarnya. Jumlah ulama dan guru besar Taimiyah mencapai lebih dari dua ratus syekh.<sup>49</sup> Di antara sekian banyak guru yang telah mentransformasi ilmunya dapat disebutkan antara lain:

- a. Syam ad-Din Abd Rahman Ibnu Muhammad Aibn Ahmad al-Maqdisi (597-682 H). Adalah seorang ahli hukum Islam (fiqh) dan Hakim Agung pertama dari kalangan mazhab Hambali di Syria, setelah sultan Baybras (1260-1277 M) melakukan pembaharuan di bidang peradilan.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>49</sup> Abu Hasan Ali an-Nadawi, *Syikul Islam Ibnu Taimiyah*, terj. Qadirunnur, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), h. 45

- b. Al-Munaja Ibnu Usman al-Tanukhi (611-695 H). Ia seorang guru Ibnu Taimiyah di bidang Fiqih, tokoh tersohor di bidang fiqih pada zamannya di Syam (Suriah). Ia juga seorang mufassir dan ahli nahwu, pemberi fatwa dan pengarang. Karangannya antara lain; Syarh al-Mughni sebanyak empat jilid, Tafsir Al-Qur'an, ikhtisar al-Mashul, dan lain sebagainya.
- c. Ibnu Abd al-Qowiy (603-699 H) adalah seorang ahli Hadis, Fiqih, nahwu dan pengarang. Karyanya antara lain; Kitab al-Furuq.
- d. Ibnu Abd al-Da'im (557-678 H) seorang guru Ibnu Taimiyah di bidang hadis. Di antara ulama yang meriwayatkan hadis darinya adalah al Syaikh al-Muhy al-Din al-Nawawi dan Ibnu Daqiq al-id. Ibnu Taimiyah belajar dengannya musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab Shahih Enam (Kutub al-Sittah).<sup>50</sup>

—Melihat jumlah dan kualitas guru-guru Ibnu Taimiyah, di samping keberadaan sosok Ibnu Taimiyah itu sendiri, maka dapat di mengerti mengapa ia menjadi seorang yang berilmu luas, kritis dan berpandangan orisinal. Dan pada gilirannya ia mampu melahirkan murid-murid yang memiliki kualitas ilmu keagamaan yang handal antara lain: al-Hafiz Ibnu Rajab<sup>51</sup> dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi sosial dan dekadensi akhlak serta moral. Masyarakat khususnya tempat Ibnu Taimiyah lahir, dan umumnya di seluruh wilayah kekuasaan Mamalik, atau bahkan di banyak kawasan lain, sangat heterogen, baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, budaya dan hukum. Sebagai akibat sering terjadi perang, mobilitas penduduk dari berbagai bangsa sangat tinggi. Dalam satu wilayah banyak macam bangsa; Arab asal Irak, Arab asal Suriah, Mesir, Turki, Tartar yang jatuh tertawan dan kemudian menetap. Armenia dan sebagainya, sedang mereka berbeda satu sama lain dalam adat istiadat, tradisi, perilaku, dan alam pikiran. Hal itu jelas menimbulkan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 45

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 18

kerawanan-kerawanan kehidupan bernegara. Dalam suasana demikian sukar diciptakan stabilitas politik, keserasian sosial dan pemupukan moral serta akhlak, yang lebih parah lagi, pada waktu itu masalahnya tidak hanya banyak agama yang berbeda satu sama lain, tetapi juga banyak mazhab, termasuk juga mazhab-mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.<sup>52</sup> Ibnu Taimiyah wafat pada tanggal 20 Dzulqaidah 728 H atau 26 September 1328 M dalam penjara di bentang Qal'ah.

## 2. Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah

Etika politik Ibnu Taimiyah membimbing umat Islam untuk meraih kekuasaan dan kejayaan dengan membuat cerita yang agung dengan menelaah pola hubungan yang ada antara manusia dengan kemanusiaan. Berawal dari rumusan tersebut, Ibnu Taimiyah hanya ingin membangun model yang baik di antara umat yang telah dibimbing oleh eksistensi dakwah dengan kembali kepada hukum, untuk kepentingan bersama antara umat, pemimpin dan pencipta. Buat hubungan transparan antara yang dipimpin dan Allah SWT itu adalah dasar dari semua tindakan yuridis di mana penerapan hukum dalam kehidupan manusia ditetapkan.

Gagasan amal ma'ruf nahi mungkar "Etika Politik" yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam dalam rangka melindungi upaya rakyat suatu negara yang telah melupakan keadilan dan miliknya sendiri. mandat. titipan dari Tuhan. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik, gagasan Ibnu Taimiyah untuk menciptakan negara yang ideal adalah dengan menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama pandangan hidupnya atau nilai-nilai politik yang baik, yaitu tanggung jawab (al-amanah), keadilan. . (al-is), persaudaraan (al-ukhuwah), menghormati keragaman dan keragaman (ta'addudiyah), kesetaraan (al-musawab),

---

<sup>52</sup> Munawir Shjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran Sejarah dan Islam*, (Jakarta: UIPress, 2003), h. 80-81.

pertimbangan (al-syura), prioritas perdamaian (al-silm), kontrol (amr bi al-ma'ruf nahy an al-munkar).<sup>53</sup>

Ibnu Taimiyah banyak membahas tentang etika politik dalam perspektif Islam, salah satunya membahas tentang bagaimana mengangkat seorang pemimpin masa depan agar dapat menjalankan kepemimpinannya secara amanah, adil dan menguntungkan bagi umatnya. Ada empat pemikiran Ibnu Taimiyah dalam mengangkat seorang pemimpin dan menjalankan kepemimpinannya dalam suatu jabatan pemerintahan, sebagai berikut:<sup>54</sup>

**a. Mengangkat yang paling layak dan sesuai (*Ashlah*)**

Ketika Nabi SAW menaklukkan kota Mekkah dan menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, Abbas bin Abdil-Muttalib ingin meminta kunci tersebut agar beliau bisa melakukan dua pekerjaan sekaligus yaitu memberi air kepada para peziarah dan menjadi pelayan. Ka'bah Berkaitan dengan kejadian ini, Surat An-Nisa': 58-59 menunjukkan bahwa Rasulullah saw. Tinggalkan kuncinya ke keluarga Syaibah.

Oleh karena itu, adalah tugas kepala pemerintahan (waliyyul-amri) untuk menunjuk orang yang paling kompeten dan layak yang dapat ditemuinya untuk melaksanakan tugas tersebut.<sup>55</sup> Pengangkatan pejabat yang membidangi urusan Islam harus dilakukan. Oleh karena itu, perlu diadakan pemilihan yang sangat selektif bagi orang-orang yang layak (al-mustahiqqin) untuk mengisi jabatan, pejabat yang menjadi wakil (nuwwab) di berbagai kota (amshar), gubernur (umara) yang mewakili kepala pemerintahan. (dzawi as-sulthan) di daerah, ketua pengadilan (hakim), juga para panglima militer dan seterusnya, dari panglima tertinggi sampai yang terendah, dan juga pejabat dari sektor keuangan, seperti menteri. Administrasi

---

<sup>53</sup> Dedi Syaputra, *Tesis; Etika Politik: Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitab al-Siyasah al Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Raiyyah*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011), h.2

<sup>54</sup> Achmad Farid, *Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam*, Dauliyah, 2 Juli 2019, Vol. 4, No 2 h. 76

<sup>55</sup> Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam, terj. Rofi' Munawwar*, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 4

keuangan (Wuzara), penggalangan dana, administrasi dana ilmiah dan seni, pengumpulan pajak Kharaj dan Zakat dan properti milik Muslim lainnya. Masing-masing pejabat tersebut harus mendelegasikan tugas atau menunjuk orang yang paling memenuhi syarat, itupun harus digunakan dalam pengangkatan imam salat, muazin, dosen (guru), pembaca Al-Qur'an, Amirul Haji, petugas pos dan kontrol. Hal yang sama berlaku untuk unit intelijen, bendahara, pasukan keamanan dan penjaga, yang hadir sebagai penjaga dan pos di benteng dan kota, serta di unit militer dari tingkat pusat hingga daerah, pemimpin suku dan penguasa pasar dan daerah. Kepala (qura) yang memiliki gelar (dihqan).<sup>56</sup>

#### **b. Memilih Yang Terbaik Kemudian Yang Dibawahnya**

Jika benar-benar memahami masalah ini, jelas tidak ada cara lain selain memilih yang paling cocok dan tepat (benar). Masalahnya, bagaimanapun, adalah jarang ada orang yang benar-benar memenuhi syarat untuk melakukan tugas seperti itu. Maka dalam hal ini yang terbaik akan menjadi pilihan, jika bukan yang terbaik dari jajaran bawah secara berturut-turut, yang kemudian menjadi pilihan dalam setiap penugasan kerja (manshab) dalam hal seleksi yang ketat (ba'da al-ijtihād at -tam) dan pilihannya (akhdzuha) dalam menetapkan walayat kepada orang-orang yang memenuhi kriteria (bihaqqiha), maka yang melakukan seleksi penugasan jabatan tersebut telah memenuhi amanahnya, menunaikan dan menjalankan tugasnya di bidangnya. Dengan menerapkan kebijakan ini, ia tergolong imam yang benar di sisi Allah, meskipun ada beberapa hal yang masih kurang sehingga tidak memungkinkan untuk dimusnahkan.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 5

<sup>57</sup> Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 14

Dalam hal ini Allah swt. Berfirman dalam Q.S at-Taghabun: 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتِطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا  
لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ



Artinya : *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*

Siapa saja yang melaksanakan kewajiban dengan segala daya upayanya, dialah orang yang telah mendapatkan petunjuk. Rasulullah saw. Bersabda yang artinya: “*Apabila aku perintahkan kepadamu tentang suatu urusan, maka laksanakanlah semampumu*”. (H.r. Bukhari dan Muslim).

Namun, jika seseorang tidak memiliki keterampilan, tidak berhak atas tugas tersebut atau tidak bersifat amanah (khiyanah), maka akan dikenakan sanksi hukum kepadanya. Jadi seseorang yang memiliki kewenangan untuk mengetahui siapa yang paling berhak (ashlah) untuk menjalankan suatu tugas (fii kulli manshab) karena walayat memiliki dua pilar (ruknani): otoritas (al-quwwah) dan amanat.<sup>58</sup>

Kekuasaan kekuasaan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan peradilan terhadap sesama adalah ilmu tentang keadilan menurut tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan kemampuan untuk menyelenggarakan

---

<sup>58</sup> Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam, terj. Rofi' Munawwar*, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 15

hukum (di tengah-tengah masyarakat).<sup>59</sup> Sedangkan sifat Amanat yang erat kaitannya dengan rasa takut (Khauf) kepada Allah swt, tidak memperdagangkan ayat-ayat-Nya dengan harga yang murah dan tidak takut kepada manusia lain. Ketiga karakter (khishal) ini diciptakan oleh Tuhan sebagai prinsip yang mengatur untuk mengatur manusia. Sebagai firman-Nya, “*karena itu janganlah engkau menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itu dalah orang-orang kafir.*” (Q.s. al-Maidah:44).

**c. Pemimpin Yang Mempunyai Sifat Otoritas (Quwwah) Dan Amanat Sekaligus.**

Realitas menunjukkan bahwa sangat sedikit orang yang memiliki sifat kewibawaan (quwwah) dan amanah sekaligus. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa menurut hukum, penyelesaian masalah yang timbul di antara manusia harus diselesaikan dengan cara yang adil sebagaimana diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain menanamkan kepercayaan dan menegakkan keadilan secara adil dan jujur, para pemimpin negara harus menumbuhkan refleksi. Cinta konseling adalah cerminan salah satu kualitas orang percaya dan dipuji oleh Tuhan. Ketika penyuluhan telah dilakukan, ternyata sebagian besar dari mereka ingin mengikuti tuntunan Kitab dan As-Sunnah atau Ijma' umat Islam, maka menurut Ibnu Taimiyah wajib mengikuti wasiat. Tidak seorang pun dapat menyimpang dari pendapat seperti itu, sekalipun ia adalah seorang tokoh terkemuka di bidang agama dan politik.

Pemimpin (*ulil amri*) dalam surat An-Nis ayat 59 menurut pendapat Ibnu Taimiyah terdiri dari para pemimpin negara (*umara*) dan ulama.<sup>60</sup> Ketika dalam walayat (jabatan pemerintah) kebutuhan akan sikap

---

<sup>59</sup> Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 16

<sup>60</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu' a-Rasail al-Kubra*, (Kairo: Maktabah al-Misriyyah), Jilid I, h.223

amanah sangat dibutuhkan, orang yang memiliki kejujuran untuk membawa kepercayaan adalah orang yang paling cepat mengisi posisi tersebut. Di bidang militer, ketika seorang penguasa mengangkat seorang panglima yang berperilaku demikian, konsultasi (konsultasi) dengan seorang ahli dan ulama (ulul 'ilmi) melihat dua kriteria, yaitu amanat dan ketegasan.

Seorang ulama ditanyai fatwa, jika tidak ada yang berhak menjadi hakim, kecuali orang yang berilmu tetapi jahat, dan orang bodoh yang setia pada agama, siapa yang akan dipilih? Jawabannya, pilihan didasarkan pada tingkat kebutuhan. Artinya, jika komitmen keagamaan lebih dibutuhkan karena dominasi gejolak sosial, pilihan jatuh pada mereka yang memiliki ketaqwaan beragama yang tinggi. Tetapi jika Anda membutuhkan seseorang yang pandai menemukan masalah yang kompleks, pilihan jatuh kepada mereka yang berpengetahuan.<sup>61</sup>

Kebanyakan ulama cenderung kepada mereka yang memiliki kualitas agama yang lebih baik. Para imam sekolah juga setuju bahwa orang yang memegang jabatan ini adalah seseorang yang dapat melakukan keadilan dan layak untuk bersaksi, yaitu profesi religius. Para ulama, di sisi lain, memiliki perbedaan pandangan tentang kriteria ilmiah apakah itu seorang mutjahid atau apakah otoritas dapat diberikan kepada seseorang yang hanya mengikuti pendapat Imam (Muqallid) atau apakah ia harus memprioritaskan mereka yang benar-benar memenuhi syarat utama. kriteria, jadi cari yang standarnya setingkat di bawah pilihan utama; yang memenuhi semua persyaratan.

#### **d. Metodologi Untuk Mengetahui Yang Layak Dalam Pengangkatan.**

Prinsip dari sub-bab ini adalah mengetahui yang paling cocok. Hal ini dapat dicapai dengan mengetahui tujuan wewenang (walayat) dan cara

---

<sup>61</sup> Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam*, terj. Rofi' Munawwar, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 25

mencapainya. Ketika tujuan dan sarana dukungan dipahami dengan baik, masalahnya sempurna. Maka tidak heran jika mayoritas raja atau kepala negara cenderung pada kehidupan duniawi dan kelezatannya. Dengan memilih personil untuk mendukung aspirasi kekuasaan mereka, sudah menjadi sifat penguasa yang memiliki prioritas aspirasi kekuasaan (*ris'ah*) yang lebih tinggi untuk diri mereka sendiri untuk menunjuk seseorang yang bersedia mendukung kepemimpinan mereka.

Tujuan yang ingin diwujudkan dalam setiap kewenangan adalah untuk meningkatkan kehidupan beragama umat. Jika dia diabaikan dengan cara ini, itu adalah kerugian yang akan diperoleh dan semua yang dia lakukan di dunia akan sia-sia. Itu juga meningkatkan semua elemen yang hanya dapat dipertahankan dengan agama itu. Hal ini dapat dicapai melalui dua cara: pertama, pembagian harta kepada yang berhak (*al-mustahiqqin*), dan kedua, penerapan sanksi hukum (*'uqubat*) bagi pelanggaran aturan hukum (*al mu'taddin*). Jadi siapa yang tidak bertobat; Melanggar aturan agama, dia adalah orang yang saleh dalam kaitannya dengan agama dan dunianya.

Seorang pemimpin yang menggunakan semaksimal mungkin (*ijtihad*) semua keahliannya dalam kaitannya dengan perbaikan (*ishlah*) urusan agama dan duniawi, maka dia adalah tokoh zamannya dan juga Mujahid terpenting di jalan Allah. hari dalam kehidupan Seorang pemimpin yang saleh lebih baik dari enam puluh tahun ibadah. Ketika bawahan menyimpang di satu sisi dan pemimpin melakukan hal yang sama di sisi lain, hal-hal menjadi penting.<sup>62</sup>

Di dalam kitab Sunan juga diriwayatkan bahwa Rasul saw, bersabda “*Orang yang berusaha (sa'i) untuk bersedekah dengan kesungguhan, bagaikan mujahid fi sabilillah.*”<sup>73</sup> Jelaslah sudah, bahwa tujuan Allah mengutus para Rasul dan menurunkan Kitab-Nya

---

<sup>62</sup> Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam, terj. Rofi' Munawwar*, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 21

adalah agar manusia melaksanakan; menegakkan keadilan, baik yang berkenaan dengan hak-hak Allah maupun pada hak-hak sesama makhluk. Barangsiapa menyimpang dari Al-Qur'an akan diluruskan dengan besi (senjata).

Dengan kata lain, dasar yang benar dari agama ini adalah mushaf (Al-Quran) dan pedang. Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah yang berkata: Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah (damai dan berkah besertanya) untuk menyerang dengan (pedang) ini mereka yang menyimpang (mushaf) “ketika hal ini menjadi tujuan utama (yaitu memuliakan Firman Allah), oleh karena itu perlu adanya suatu implementasi atau media yang dapat mendekati tujuan tersebut, media (pelaku) yang mendekatinya dapat membawa hal tersebut. tujuan harus dicari oleh dua orang; siapa pun yang dapat mendekati tujuan ini berhak untuk dipilih sebagai wali ketika seseorang dipilih.<sup>63</sup>

Ketika seorang walayat (kewajiban agama) berbentuk pemandu (imama) dalam shalat, penentuan pengangkatannya dilakukan dengan prioritas sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Nabi (saw).

Ketika ada dua kandidat dengan kelebihan dan kekuatan yang seimbang dan sulit untuk menentukan yang paling memenuhi syarat dan cocok, sistem voting digunakan untuk memilih mereka. Inilah yang terjadi pada Sa'ad bin Abi Waqqash yang terpilih menjadi panglima perang Al-Qadisiyyah dengan selisih satu suara karena perbedaan pendapat di antara mereka saat itu<sup>64</sup>

#### **D. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan asas berupa teori ataupun kajian yang ditemukan melalui hasil penelitian sebelumnya yang menjadi data pendukung atau acuan. Hasil

---

<sup>63</sup> Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam, terj. Rofi' Munawwar*, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 23

<sup>64</sup> Ibnu, Taimiyah, *Siyasah Sar'iyah, Etika Politik Islam, terj. Rofi' Munawwar*, cet. Ketiga, (Surabaya: Risalah Gusti, 2005), h. 24

penelitian terdahulu menjadi salah satu bentuk dari data pendukung yang bagi penulis bisa menjadi bagian tersendiri guna menjadi referensi yang signifikan terhadap permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian. Karena dari penelitian terdahulu, penulis bisa menentukan posisi dan perbedaan penelitian yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan penelitian. Oleh sebab itu penulis melakukan pengkajian terhadap jurnal, skripsi, maupun tesis terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti. Berikut adalah beberapa penelitian relevan yang ditemukan oleh peneliti:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aisya Amini Tanjung dari Fakultas Ushuluddin dan Ilmu Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2019 berjudul *Kepemimpinan Camat dalam Perspektif Etika Politik* oleh Ibnu Taimiyah. Temuan dari penelitian ini Pimpinan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan menggunakan kepemimpinan yang demokratis dimana camat mencerminkan pemimpin yang amanah dan adil serta selalu melibatkan staf Kantor Kecamatan Natar dalam segala keputusan mengingat perannya dalam menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah dianggap sangat penting. Camat juga diyakini telah memberikan contoh yang baik dan dapat menjadi motivator bagi staf Camat Natar. Kepemimpinannya juga sangat bermanfaat bagi kebaikan masyarakat karena menghasilkan kebijakan yang berdampak baik bagi masyarakat.

Selain itu, pengangkatan Kepala Distrik Manajer didasarkan pada keterampilan dan kemampuan yang dianggap paling tepat untuk mengisi dan memegang jabatan tersebut. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran etis-politik Ibnu Taimiyah tentang pengangkatan Kepala Negara (Ashlah) yang paling tepat. Pada saat diangkat, Camat dianggap sebagai yang terbaik untuk melaksanakan dan mengemban amanat Negara sebagai Camat di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Persamaan penelitian pada karya ini adalah sama sama meneliti tentang sebuah kepemimpinan menggunakan perspektif etika politik dari Ibnu Taimiyah. Selain itu metode penelitiannya juga sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada subjek dan objek

penelitian. Peneliti melakukan penelitian terhadap kepemimpinan kepala desa dan objek penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Pemerintahan Kecamatan dan subjeknya adalah seorang Camat.

Kedua, Penelitian yang berjudul Analisis Hukum Islam Tentang Kepemimpinan Camat Dalam Pengabdian kepada Masyarakat (Studi di Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara) yang dilakukan oleh Fitria Wulandari dari Fakultas Syariah, Jurusan Siyasah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2017. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan Camat dalam pelayanan publik dan hasil penelitian menunjukkan bahwa: Camat dalam menjalankan kepemimpinannya harus mematuhi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang Berkualitas. Pelayanan publik di Kecamatan Abung Surakarta Lampung Utara dikatakan cukup berhasil dalam memberikan pelayanan manajemen kependudukan secara cepat dan baik.

Persamaan penelitian pada karya ini adalah sama sama meneliti tentang sebuah kepemimpinan. Selain itu metode penelitiannya juga sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada subjek dan objek penelitian. Peneliti melakukan penelitian terhadap kepemimpinan kepala desa dan objek penelitian dilakukan di Kantor Kepala Desa. Sedangkan penelitian terdahulu dilakukan di Kantor Pemerintahan Kecamatan dan subjeknya adalah seorang Camat. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan Camat dalam pelayanan publik, beda dengan yang peneliti teliti adalah etika politik kepemimpinan kepala desa.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Alba Rohma Triwijaya mahasiswi Fakultas Syariah lulusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Analisis Komparatif Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun Tahun 2017. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah mencoba memahami etika politik dua tokoh muslim yang dapat dijadikan acuan teori politik Islam, hidup pada waktu dan situasi yang berbeda, dan

hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pemikiran Etis Ibnu Khaldun harus seimbang urusan dunia dan kehidupan setelah kematian. Keduanya sepakat bahwa seorang pemimpin sebagai pemecah masalah bagi warga negaranya, berdirinya negara adalah suatu keharusan dan bahwa keadilan adalah tujuan dari kepemimpinan negara. Kemudian, sesuai dengan penelitian yang relevan, peneliti mencoba melakukan penelitian lain dengan menggunakan indikator kepemimpinan dan etika politik Islam dengan tambahan teori dari berbagai ahli.<sup>65</sup>

Persamaan penelitian pada karya ini adalah masalah yang diangkat dalam penelitian adalah etika politik tokoh muslim yang dapat dijadikan acuan teori politik Islam. Jika pada penelitian ini hanya pemikiran Ibnu Taimiyah penelitian sebelumnya membahas pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Perbedaannya tidak membahas tentang kepemimpinan. Selain itu juga termasuk penelitian pustaka.

Keempat, penelitian yang dilaksanakan oleh Farhah<sup>66</sup> dan Achmad Farid<sup>66</sup> pada tahun 2019, yang berjudul Prinsip Etika Politik dalam Islam. Dalam kajiannya, penulis menggambarkan pentingnya etika politik dari sudut pandang Islam. Akhlak Siyasah yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Al-Hadis merupakan bentuk upaya manusia untuk menciptakan kebaikan bagi umat manusia, baik muslim maupun non-Islam. Ada beberapa prinsip etika politik yang harus diperhatikan oleh para pemimpin bisnis, politisi dan masyarakat umum. Ini tentang prinsip. Agama sebagai landasan etika seorang pemimpin, dapat diandalkan kekuatannya, arif dan adil secara hukum, cerdas dan cakap dalam pekerjaannya, serta mampu berakal. Pemimpin harus cerdas dan berintelektual, kompeten di bidangnya, dan mampu mengikuti proses yang cermat dalam mengambil keputusan kebijakan. Dalam Islam, umat Islam dituntut tidak hanya untuk berbuat kebaikan bagi dirinya sendiri, tetapi juga mencegah keburukan bagi orang lain.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Triwijaya, Alba, 2018, *Skripsi : Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah Dan Ibnu Khaldun*, (Lampung : UIN Raden Intan)

<sup>66</sup> Farhah, Achmad Farid, „Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam“, *Jurnal Dauliyah*, Vol. 4, No. 2, (2019), h. 66–84.

Persamaan penelitian sebelumnya, keduanya membahas etika politik Islam. Ini menjelaskan bagaimana etika politik berhubungan dengan ajaran Islam. Tentang bagaimana etika pemimpin dalam menjalankan tugasnya di masyarakat berdasarkan prinsip Islam didalam Al Qur'an dan Hadist. Perbedaannya jika penelitian sebelumnya hanya membahas tentang prinsipnya saja penelitian ini lebih berfokus pada kepemimpinan di suatu desa.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Muh. In'amuzzahidin pada tahun 2015, yang berjudul Etika Politik dalam Islam. Peneliti mengklaim dalam tulisannya bahwa etika politik secara keseluruhan diungkapkan dan dikonstruksi oleh para pemikir Islam, yang ideal untuk diterapkan dalam kehidupan politik. Diterapkan pada negara demokrasi seperti Indonesia, ada anggapan bahwa Indonesia bukan negara muslim dan karenanya tidak berlaku, namun masih ada beberapa syarat yang dianjurkan sebagai pemimpin. Oleh karena itu, penulis mendukung gagasan Al-Farabi untuk memberikan solusi mobilisasi kepemimpinan, dengan mempertimbangkan keterampilan masing-masing. Misalnya, dalam kegiatan politik yang berhubungan langsung dengan politisi dan dalam penggunaan dan pertimbangan nilai-nilai etika politik, kehidupan politik membentuk budaya politik yang lebih santun dan dirasakan langsung oleh semua orang.<sup>67</sup>

Serupa dengan penelitian sebelumnya, keduanya membahas etika politik Islam. Ini menjelaskan bagaimana etika politik berhubungan dengan ajaran Islam. Bagaimana etika pemimpin dalam menjalankan tugasnya di masyarakat? Mengenai kesamaan kajian, keduanya membahas etika politik dalam pemilihan kepala daerah. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian ini berfokus pada kepemimpinan di suatu desa.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir bisa diartikan menjadi model konseptual perihal bagaimana korelasi antara teori menggunakan faktor yang mengidentifikasi menjadi persoalan penting, buat

---

<sup>67</sup> Muh. In'amuzzahidin, Etika Politik Dalam Islam", *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, Vol. 2, No. 2, (2016), h. 105

jelasnya pada alr kerangka pada penelitian ini bisa dilihat asal gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Gambar 2.1 Ibnu Taimiyah banyak membahas tentang etika politik dalam perspektif Islam, salah satunya gagasannya ialah amal ma'ruf nahi munkar "etika politik". Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik gagasan Ibnu Taimiyah untuk menciptakan negara yang ideal adalah dengan menggunakan Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber utama dalam pandangan hidupnya dan juga nilai-nilai politik yang baik yaitu tanggung jawab (al-amanah), keadilan (al-is), persaudaraan (al-ukhuwah), menghormati keragaman dan keberagaman (ta'addudiyah), kesetaraan (al-musawab), musyawarah (al-syura), perdamaian (al-silm), pengendalian (amr bi al-ma'ruf nahy an al-munkar). Dari nilai-nilai etika politik itulah yang kemudian digunakan dalam konsep kepemimpinan yang diharapkan dari seorang pemimpin terutama kepala desa dalam menjalankan tanggungjawabnya, agar dapat mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dengan seorang pemimpin yang baik pula.

